

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

1. “PT. Jasa Raharja (Persero), 2017 *Annual Report*”, PT. Jasa Raharja (Persero), 2017.
2. “PT. Jasa Raharja (Persero), 2018 *Annual Report*”, PT. Jasa Raharja (Persero), 2018.
3. ”Pedoman Manajemen Risiko PT. Jasaraharja”, Buku Panduan Resmi PT. Jasa Raharja (Persero), 2014
4. Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Jakarta: Pustaka Pelajar (Cetakan V), 2016.
5. Darmawi, Herman.. *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara, Jakarta. 2005
6. Djojosoedarso, S. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003
7. Ganie, Junaedy. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
8. Hadikusumo, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995
9. Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta, Sinar Grafika, 1990.
10. Hasal, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
11. Is, Muhamad Sadi, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

12. Muhammad, Abdulkadir. Pokok- Pokok Hukum Pertanggung: Bandung: Alumni, 1983.
13. Nainggolan, Pahala. Akuntansi Keuangan Yayasan dan lembaga Nirlaba Sejenis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
14. Nugroho D, Riant dan Ricky Siahaan. BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan dan. Strategi, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2005.
15. Pangaribuan Simanjuntak, Emmy. Seri Hukum Dagang: Hukum Pertanggung, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982). Seri Hukum Dagang: Pertanggung Wajib Sosial, (Yogyakarta: FH UGM, 1980). Revisi. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
16. Siahaan, Hinsu. Manajemen Risiko pada Perusahaan & Birokrasi, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
17. Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
18. Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta, 2017.
19. Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik). Depok: Rajawali Pers, 2018.
20. Utsman, Sabian. Metodologi Penelitian Hukum PROGRESIF; Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
21. Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia Publishing, 2005.
22. Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Yogyakarta : Media Presindo, 1 Januari 2019.

B. Artikel /Jurnal /Makalah

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemailitan Perusahaan Asuransi Di Indonesia, Jakarta, 2005.
2. Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional Tahun 2014, Jakarta; 2014.
3. Meazak, Meray Hendrik “Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, Jurnal Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol. V No. 3, Maret 2006.

C. Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan

1. Undang-Undang
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
 - c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu lintas Jalan.
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
 - g. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
 - h. UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

2. Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2009.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

3. Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan anggota Direksi dan/atau Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

4. Peraturan, Keputusan, dan Surat Edaran Menteri

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisairs/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-16/MBU/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: 4 PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- e. Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- f. Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang.
- g. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penetapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.